

Awas, Berpura-pura Miskin Bisa Dipidana



DI LAMPU MERAH: Pengemis di Banjarmasin kini dikabarkan kian marak.

Sumber gambar :

<https://images2.prokal.co/webraban/files/berita/2022/11/07/6fd16c74d3bb07091257add539c5afa5.jpg>

Pemko Banjarmasin melalui dinas terkait bakal bersikap tegas terhadap pemalsuan data. Bagi warga maupun tim validasi jika memberikan data palsu dengan berpura-pura miskin bersiaplah dipidanakan.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Banjarmasin, Dolly Syahbana menjelaskan bahwa peraturan daerahnya sudah digodok. Kini dalam tahap finalisasi. “Tinggal menunggu penerapan di tahun 2023 mendatang. Nanti, kami juga akan mengusulkan paraturan wali kota (Perwali) agar lebih efektif penerapannya,” ujarnya.

Menurut Dolly, Kementerian Sosial (Kemensos) RI telah mengeluarkan aplikasi cek bansos. Buat memudahkan setiap orang bisa mendaftarkan diri untuk menjadi penerima bansos alias bantuan sosial.

Kendati demikian, bukan berarti bisa sembarangan. Seusai memasukkan data, pihak petugas dinsos di masing-masing daerah akan melakukan verifikasi langsung ke lapangan. Supaya bansos yang disalurkan tepat sasaran.

Sebagai gambaran data Kemensos RI, di Banjarmasin terdata sebanyak 816 KK yang diusulkan untuk masuk dalam Data terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada tahun 2022. Jumlah itu masih akan diverifikasi dan ditindaklanjuti oleh tim validasi. “Dari total 816 KK, sebanyak 155 KK sudah diterima. Sudah ada 87 KK ditolak oleh tim validasi,” ucapnya.

Lantas bagaimana sisanya mencapai lebih dari 500 KK itu? Terkait hal tersebut, Dolly bilang masih dalam tahap verifikasi. Sempat terhenti karena aplikasi baru yang dikeluarkan Kemensos RI baru saja selesai perawatan.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Ini peringatan bagi warga Banjarmasin maupun aparat yang mencantumkan orang mampu menjadi orang miskin dengan tujuan mendapatkan bantuan.

Risikonya, bukan sekadar sanksi ringan atau teguran, melainkan akan dipidanakan.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Dolly Syahbana dalam jumpa pers, Selasa (1/11/2022).

“Perda sudah tahap finalisasi, kita tinggal menunggu penerapan pada tahun 2023, nanti kita akan minta Perwali agar lebih efektif, sehingga jika ada warga yang berpura-pura miskin, serta RT yang memasukan keluarganya yang mampu juga akan kita beri sanksi pidana,” papar Dolly.

Saat ini Kementerian Sosial mengeluarkan aplikasi cek bansos, yang memudahkan setiap orang bisa mendaftarkan diri untuk menjadi penerima bantuan sosial, namun setelah memasukan data, pihak Dinsos kota akan melakukan verifikasi dilapangan, agar bansos tepat sasaran.

Berdasarkan data Kemensos, di Banjarmasin sejak tahun 2022 terdata 816 KK yang sudah terverifikasi untuk ditindak lanjuti oleh tim validasi apakah yang bersangkutan masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS di Kota Banjarmasin.

“Kita menerima 816 KK sejak tahun 2022, 155 sudah diterima dan 87 ditolak oleh tim validasi, sedangkan 500 lainnya masih dalam tahap verifikasi, karena aplikasi baru selesai perawatan” tutur Dolly.

Pendataan Penerima Bansos sendiri meliputi sejumlah syarat mulai dari Kepemilikan Aset, Data Keluarga, dan Pekerjaan.

Sumber Berita:

1. <https://kalsel.prokal.co/read/news/48505-awas-berpura-pura-miskin-bisa-dipidana.html>
2. <https://wartabanjar.com/2022/11/01/nah-lho-warga-banjarmasin-ngaku-miskin-demi-dapat-bantuan-bakal-dipidanakan/>

Catatan:

Pengaturan mengenai Bantuan Sosial secara umum tertuang dalam:

- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detil pada Peraturan Dimaksud.
- Permendagri Nomor 77 tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran Permendagri nomor 77 tahun 2020 angka 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi huruf f. Belanja Bantuan Sosial
 - 1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
 - 2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
 - 3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
 - 4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi: a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

- 6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- 8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- 9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- 10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- 11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- 12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- 13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- 14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- 15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
- 16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;

- b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - (1) rehabilitasi sosial
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - (2) perlindungan sosial
ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - (3) pemberdayaan sosial
ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - (4) jaminan sosial
merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - (5) penanggulangan kemiskinan.
merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - (6) penanggulangan bencana
merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- 17) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.

- 18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- 19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.